

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan suatu kebijakan diskresi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan peradilan di Indonesia. SEMA bersifat wajib untuk ditaati dan dijalankan oleh badan peradilan di bawahnya yaitu para hakim di setiap lingkungan badan peradilan di Indonesia sebab SEMA dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam jalannya peradilan secara cepat tanggap sehingga kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan mengenai disparitas putusan para hakim.
2. Kekuatan hukum Putusan banding PTTUN Surabaya Nomor: 193/G/TF/2022/PTTUN.SBY berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* memiliki kekuatan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sepanjang tidak ada putusan yang menganulir putusan tersebut.

B. Saran

Hasil suatu rumusan yang berasal dari Rapat Pleno Kamar dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hal ini dikarenakan suatu aturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan memiliki daya ikat

yang lebih luas tidak hanya dalam lingkup internal badan peradilan melainkan juga mengikat secara eksternal yang memperluas cakupan terlaksananya kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. West Group.

Budi Sastra Panjaitan, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. Manhaji, Sumatra Utara.

Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Yogyakarta.

Fence M. Wantu, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendekia, Gorontalo.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, BPHN, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2009 *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok- Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Paulus Effendi Lotulung, 2013 *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Safri Nugraha, *et.al.*, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Sjahran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuam Hukum Sebuah Pengantar Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Liberty Yogyakarta.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta.
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtar, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yahya Ahmad Zein, dkk. 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Literasi Nusantara, Malang.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

Aan Efendi, “Problematik Penataan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, *Verita et Justitia*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, DOI: 10.25123/vej.3172.

Ari Wirya Dinata, 2021, “Implikasi Hukum Ketidapatuhan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau dari Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan”, *Jurnal Hukum Vol.4/ No.1/ Februari 2021*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Farrah Miftah. 2022. “Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2675–2682.

Mohammad Afifudin Soleh, 2018, “Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945, Februari 2018, Surabaya.

Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019, “Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Para Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2019.

Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, dkk. 2021, “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/Ptun.Dps)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 Februari 2021, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia.

Raihan Andhika Santoso, dkk., 2023, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Spyendik Bernardus Blegur, 2022, “Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.1 Februari 2022, PTUN Jayapura.

Yunita Nurwulantari dan Anna Erliyana, 2021, “Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia“, *Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan*”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Perundang-undangan”, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/380>, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2012.



3. Tesis

Mahardian, 2020, *Dualisme Kompetensi Mengadili Sengketa Perpajakan antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Universitas Airlangga.

4. Disertasi

Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Jakarta, Fakultas Pascasarja UI.

5. Peraturan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 2002, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2009, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara

Nomor 160 Tahun 2009, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Sekretariat Mahkamah Agung. Jakarta.

6. Internet

Muhammad Adiguna Bimasakti, *Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah*, https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/#_ftn1, diakses pada 10 Oktober 2023.

Nicholas Vincent, *Magna Charta Translation*, National Archives and Records Administration,

<https://www.archives.gov/files/press/press-kits/magna-carta/magna-carta-translation.pdf> , diakses 15 Oktober 2023.

Shidarta, *et. all.* 2018, Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna dan Penggunaannya, Binus- Law. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>, diakses pada 5 Maret 2023.



LAMPIRAN



Gambar 1 Foto dengan Bapak Prasetyo Wibowo (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta)



Gambar 2 Foto dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dr. Agus Budi Susilo S. H., M. H.